

**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
DALAM PEMBERDAYAAN PENGRAJIN KERAJINAN PERAK SEBAGAI PRODUK  
UNGGULAN DAERAH  
(Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)**

**Candra Arysta Putra Pradana, Tjahjanulin Domai, Suwondo**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

*E-mail: candra.putra\_500@yahoo.co.id*

***Abstract:** Department of Industry and Trade's Role in Empowering Silver Handicraft Craftsman as Special Regional Product, Empowerment has been ran with various model and its variation, it purposes to direct society lives to be better, because the main purpose of empowerment is the achievement of social welfare by society, without empowerment which is carried out by society especially that concern to peoples lives will be less optimal, moreover it can be stopped, so it can inhibiting the economy sector of that region. Basically, empowerment has role for directing, training, and educating societies to get experience, knowledge and creativity in developing their life. Through silver handicraft in Batankrajan Village, Gedeg Sub-district, Mojokerto Regency so Department of Industry and Trade has effort to perform their role in society activity growth. In this case, Department of Trade and Industry, Mojokerto Regency make empowerment to craftsman of silver handicraft through of their program with conduct training and building as well as make easier licensing of installation enterprise in order to make silver handicraft become a special regional product.*

**Keywords:** *the role of government, empowerment, silver handicraft.*

**Abstrak:** Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak sebagai Produk Unggulan Daerah, pemberdayaan selama ini dilakukan dengan berbagai bentuk dan variasinya, hal itu memiliki tujuan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik, karena tujuan utama dari pemberdayaan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya pemberdayaan maka kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang menyangkut kehidupan orang banyak akan menjadi kurang maksimal bahkan bisa berhenti, sehingga bisa menghambat roda perekonomian dari daerah tersebut. Pada dasarnya pemberdayaan berperan untuk mengarahkan, melatih, serta mendidik masyarakat agar memiliki pengalaman, pengetahuan serta kreatifitas dalam mengembangkan kehidupannya. Melalui kerajinan perak di Desa Batankrajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan berusaha melakukan perannya untuk menumbuhkan kegiatan masyarakat tersebut. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto melakukan pemberdayaan kepada pengrajin kerajinan perak melalui programnya yakni dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan serta meringankan izin pendirian usaha demi membuat kerajinan perak menjadi suatu produk unggulan daerah.

**Kata kunci:** *peran pemerintah, pemberdayaan, kerajinan perak*

---

### **Pendahuluan**

Masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multi dimensi. Kegagalan dalam proses penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terjadi akibat kurangnya pemahaman atas penyebab kemiskinan itu sendiri. Dalam hal ini akar kemiskinan diidentifikasi karena terbatasnya akses kesempatan kerja, Eko (2011). Dari akar permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi,

jumlah pengangguran serta kemiskinan tentunya akan semakin bertambah.

Di era otonomi daerah ini daerah harus memainkan perannya yang lebih signifikan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan membentuk kemandirian lokal. Bila mengacu pada konsepsi kemandirian lokal sebagaimana yang dikatakan Takdir (2012, h.75), maka peningkatan taraf hidup bangsa untuk menuju Indonesia mandiri akan bisa direalisasikan. Hal ini bisa dilakukan dengan

tetap mempertahankan potensi-potensi lokal agar bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Ketika konsepsi kemandirian lokal bisa menjamin pertumbuhan dan pengembangan pembangunan nasional utamanya untuk mengatasi pengangguran serta kemiskinan, tentu cita-cita luhur bangsa untuk memberdayakan masyarakat kecil bukan persoalan yang sulit dilakukan.

Pemberdayaan adalah tugas yang diemban oleh pemerintah, pemberdayaan dilakukan untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar mereka memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan potensinya. Dengan basis kemandirian lokal serta adanya pemberdayaan dari pemerintah, maka diharapkan terjadi sinergi yang positif dan berkesinambungan untuk keluar dari gejala-gejala sosial tersebut. Dalam konteks ini penting sekali untuk menekankan kepada masyarakat bahwa pengembangan kewirausahaan yang berbasis pada kemandirian lokal perlu dikembangkan, karena dengan hal tersebut akan tercipta lapangan pekerjaan untuk mereka, serta mengembangkan inovasi-inovasi mereka untuk secara mandiri berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pengembangan kewirausahaan untuk mewujudkan kemandirian lokal tersebut bisa diupayakan dalam bentuk usaha kecil dan menengah (UKM). Kemandirian lokal, melalui pengembangan produk unggulan dan pengembangan UKM saat ini dapat menjadi strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi daerah karena dari produk unggulan tersebut mampu mengangkat martabat suatu daerah yang berdampak pada peningkatan sumber keuangan daerah.

Kerajinan perak yang telah dianggap sebagai komoditi yang bisa diandalkan untuk peningkatan sumber keuangan daerah dalam pengelolaannya masih belum optimal. Hal itu dikarenakan pengelolaan terhadap kerajinan perak yang dilakukan oleh pengrajin perak di Indonesia khususnya Mojokerto pada umumnya masih bersifat menggunakan alat sederhana dan pemahaman pengrajin yang masih kurang mengenai model-model yang saat ini sedang tren di pasar baik domestik maupun global.

Dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi pengrajin kerajinan perak di daerah Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto maka perlu adanya suatu peran dari Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto secara optimal. Peran pemerintah daerah yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang dapat melakukan

perbaikan terhadap kondisi pengrajin kerajinan perak dalam hal memberi jalan dan sebagai distributor produk kerajinan perak. Salah satu langkah konkrit yang dapat diambil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam mengatasi kondisi tersebut adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap pengrajin kerajinan perak. Usaha pemberdayaan secara berkelanjutan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sangat penting dilakukan, hal ini mengingat pada upaya untuk menjadikan kerajinan perak sebagai salah satu produk unggulan dari Mojokerto.

### Tinjauan Pustaka

#### Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan

Menurut Arsyad (1999, h.120) ada 4 peranan yang dapat diambil oleh pemerintahan daerah yaitu :

- a. Sebagai *entrepreneur*, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan usaha bisnis.
- b. Sebagai *coordinator*, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menciptakan kebijakan. Pemerintah daerah juga bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian terhadap informasi ekonomi.
- c. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) yang ada didaerahnya.
- d. Sebagai *stimulator*, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut. Sedangkan peran disini yang akan diterapkan dalam upaya pemberdayaan industri kecil dan UKM menurut Sjaifudin (1995, h.66-75) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemampuan Finansial
2. Pengembangan Pemasaran  
Dalam hal ini terdapat tiga cara strategi pemberdayaan pemasaran, yaitu:
  - a. Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar
  - b. Proteksi pasar
  - c. Menggeser Struktur Pasar Monopoli Menjadi Persaingan
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Strategi Pengaturan dan Pengendalian
  - a. Pengaturan dan Perijinan
  - b. Perencanaan Tata Ruang

### c. Fungsi Kelembagaan

#### Strategi Pemberdayaan

Dalam melakukan pemberdayaan terhadap UKM khususnya pengrajin perak maka diperlukannya adanya strategi dalam pemberdayaan. Menurut Tambunan (2000, h.81) strategi yang konsisten terhadap pemberdayaan usaha industri kecil, antara lain :

- a. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui pemeliharaan stabilitas ekonomi makro
- b. Peningkatan integrasi yang kuat, baik antar sesama usaha industri kecil maupun antar usaha menengah besar melalui kebijakan *bussines alliancie*
- c. Penguatan sisi permintaan melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penguatan modal, penguatan sumber daya manusia termasuk peningkatan *entepreneurship* dan kemampuan penguasaan teknologi.

#### Usaha Kecil Menengah (UKM)

##### 1. Karakteristik UKM

Di lihat dari segi hokum, UKM saat ini tengah pada posisi yang lemah karena sebagian besar usahanya bersifat perorangan, tidak berakta notaris. Adapun jika ditinjau dari segi ekonomi keberadaan UKM juga memiliki posisi tawar yang lemah terhadap pasar, hal ini disebabkan karena sifat usahanya yang kurang terorganisir.

Untuk memahami itu maka diperlukan pemahaman mengenai karakteristik Usaha Kecil. Karakteristik usaha kecil tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, kadangkala pembukuan tidak di *-up to date* sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan

dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus terapan (Anoraga dan Sudantoko, 2002, h.225).

##### 2. Masalah yang Dihadapi UKM

UKM pada umumnya memiliki permasalahan-permasalahan antara lain seperti yang dikemukakan oleh Jafar (2004, H.41):

- A. Faktor Internal
  - Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan.
  - Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
  - Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar.
- B. Faktor Eksternal
  - Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif.
  - Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha.
  - Implikasi Otonomi Daerah.
  - Implikasi Perdagangan Bebas.
  - Sifat Produk dengan Ketahanan. Pendek.
  - Terbatasnya Akses Pasar.

##### 3. Upaya Pengembangan UKM

Pengembangan UKM pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal berikut:

- a. Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif
- b. Bantuan Permodalan
- c. Perlindungan Usaha
- d. Pengembangan Kemitraan
- e. Pelatihan
- f. Membentuk Lembaga Khusus
- g. Memantapkan Asosiasi
- h. Mengembangkan Promosi
- i. Mengembangkan Kerjasama Yang Setara (Tambunan, 2000, h.121).

##### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Menurut Nazir (1998, h.63) mengartikan metode penelitian kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif ini dapat dijalankan dengan melakukan survey di lokasi penelitian.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif karena di dalam fenomena di lapangan peneliti berupaya untuk menggambarkan bagaimana fenomena terkait Peran Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak sebagai produk unggulan daerah.

Sehingga fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak di Kabupaten Mojokerto, meliputi:

- 1) Peningkatan kemampuan finansial
- 2) Pengembangan Pemasaran dengan:
  - Meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar
- 3) Pengembangan Sumber daya manusia
- 4) Pemberian pengaturan dan pengendalian usaha, meliputi:
  - a. Peningkatan kemudahan dalam layanan perijinan
  - b. Penguatan kelembagaan

B. Keberdayaan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto meliputi:

1. Peningkatan pendapatan masyarakat pengrajin
2. Pemasaran hasil usaha
3. Jumlah Tenaga kerja yang terserap

C. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak agar mampu menjadikan perak sebagai produk unggulan daerah meliputi:

- a. Faktor Pendorong
  1. Tenaga kerja yang cukup banyak.
  2. Masih belum banyak pesaing yang memiliki usaha yang sama
- b. Faktor Penghambat
  1. Mahalnya harga bahan baku.
  2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
  3. Terbatasnya modal

## Pembahasan

### 1. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah.

#### a. Peningkatan Kemampuan Finansial

Dalam sudut pandang manajemen modern dapat diartikan bahwa keuangan atau finansial merupakan salah satu segi fungsional manajemen yang sangat penting selain pemasaran dan produksi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kartasasmita (1996) bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh semua usaha kecil adalah masalah finansial. Melalui penjelasan seperti itu pemerintah mulai

memberikan perhatian dengan menyediakan berbagai macam fasilitas seperti bantuan kredit lunak yang disalurkan melalui lembaga perbankan BRI dan BNI dengan nama kredit usaha rakyat.

Tujuan kredit tersebut untuk memotivasi pengusaha industri kecil yang dalam hal ini adalah pengrajin kerajinan perak Desa Batankrajan agar lebih kreatif dan menjaga kualitas produknya sehingga para konsumen tetap percaya pada produk mereka, selain itu dengan adanya bantuan kredit lunak diharapkan tidak ada permasalahan finansial karena pengusaha kecil maupun rumah tangga akan lebih mudah dalam melakukan pinjaman untuk meningkatkan finansial usahanya.

#### Pengembangan Pemasaran

- Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar

Selama ini kendala akses pasar selalu menjadi kelemahan bagi usaha kecil menengah, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Jafar (2004, h.41) dalam faktor eksternal penghambat Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mengembangkan usaha terutama terbatasnya akses pasar. Jafar mengatakan akses pasar yang terbatas akan berakibat pada produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Disperindag Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan UPN untuk pengembangan UKM dengan mengadakan pelatihan website, langkah ini dilakukan agar para pengrajin dapat menangkap akses pasar dari luar yang belum terjangkau. Selain itu Disperindag Kabupaten Mojokerto secara mandiri juga mengadakan pameran produk kerajinan perak di berbagai daerah bekerjasama dengan Disperindag daerah lain dengan maksud memperluas jangkauan pemasaran mereka sehingga tidak hanya di lingkup Bali, Solo dan Mojokerto saja namun meluas ke berbagai daerah di Indonesia.

#### b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Melihat begitu pentingnya kegunaan sumber daya manusia dalam sebuah industri kecil maka pemerintah dalam hal ini perlu mengembangkan sumber daya manusia pengusaha kecil melalui program pemberdayaan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Eko (2002) dalam dua pandangan pemberdayaan yakni Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar

seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri.

Dalam hal ini pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah mengupayakan pemberdayaan dalam mengembangkan sumber daya manusia kepada pengusaha kecil khususnya pengrajin kerajinan perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg melalui bimbingan pendidikan dan pelatihan dengan tenaga pelatihan lapangan (TPL) serta mengadakan workshop untuk pengusaha kecil secara *sustainable*.

### **c. Pemberian Pengaturan dan Pengendalian Usaha**

#### **1. Peningkatan Kemudahan dalam Layanan Perijinan.**

Di Kabupaten Mojokerto sendiri khususnya pada dinas perindustrian dan perdagangan guna membantu para pengrajin kerajinan perak, dinas sudah menyiapkan serta menerapkan langkah strategis untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha kerajinan perak untuk mendirikan usahanya agar memiliki kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam konsep Usaha kecil oleh Tohar (2002, h.31) dikatakannya bahwa untuk menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil harus melalui aspek perundang-undangan serta aspek kebijakan. Salah satu aspek utama adalah perizinan usaha, yang dimaksud disini adalah penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan aspek perizinan usaha, hal ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan antara lain, untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan sistem pelayanan satu atap. Serta memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.

Hal ini secara nyata terbukti bahwa ada penambahan wirausaha khususnya di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg dari 1 orang kemudian sekarang menjadi 22 wirausaha yang kemudian telah mempunyai unit badan usaha sendiri-sendiri yang bergerak pada kerajinan perak.

#### **2. Penguatan Kelembagaan**

Peran pemerintah terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam kapasitasnya untuk mengatur serta mengendalikan suatu usaha kecil, ini sesuai dengan konsep upaya pemberdayaan industri kecil dan UKM salah satunya sebagaimana yang dikatakan oleh, Sjaifudin (1995, h.66-75). Bahwa upaya pemberdayaan industri kecil dan UKM pada *point* Strategi Pengaturan dan Pengendalian, di sana disebutkan tentang adanya fungsi kelembagaan untuk dinas, maksudnya Dalam hal ini instansi seperti Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto merupakan inisiatif untuk mengembangkan usaha kecil serta terpadu dan berjangka panjang yang sejalan dengan upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut para pengrajin yang terdapat di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, membentuk lembaga yang dinamakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Majapahit Jewelry. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan agar pemerintah lebih mudah untuk mengendalikan serta mengatur usaha ini secara efektif.

### **2. Keberdayaan UKM yang Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan an Kabupaten Mojokerto.**

#### **a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pengrajin**

Menurut Elliot (dalam Riyadi dan Supriadi, 2004, h.80) menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan atau *empowerment* salah satunya adalah strategi dengan pendekatan *The Welfare State*, inti dari strategi ini menyebutkan bahwa pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdayakan masyarakat dalam menghadapi proses politik, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.

Jadi jelas bahwasannya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terutama dari Disperindag Kabupaten Mojokerto harus mampu mengeluarkan potensi masyarakat, yang kemudian hal itu berdampak dengan tumbuhnya usaha kerajinan perak dengan baik serta juga ditandai dengan bertambahnya jumlah pengrajin. selain itu dari sudut pendapatan juga ada kenaikan secara signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Omset Pengrajin Kerajinan Perak Desa Batankrajan Tahun 2012 menunjukkan bahwa rata-rata omset pendapatan mereka cukup tinggi dari ratusan ribu sampai puluhan juta.

#### **b. Pemasaran Hasil Usaha**

Kita perlu mengingat bahwa kendala utama UKM selain pada modal adalah pemasaran hasil usaha yang selama ini dihadapi oleh UKM dan pengrajin kerajinan perak yang termasuk di dalamnya. Dalam teori strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Tambunan (2002, h.81) pada *point* ketiga bahwa pemberdayaan usaha industri kecil melalui penguatan sisi permintaan melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penguatan modal, penguatan sumber daya manusia termasuk peningkatan *entrepreneurship* dan kemampuan penguasaan teknologi.

Melihat fakta apa yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto dengan

mengadakan pembinaan, pengarahan melalui pelatihan website, desain grafis serta pameran produk adalah untuk mengembangkan penguasaan teknologi, penguatan kreativitas untuk penguatan sumberdaya manusia, serta penguatan jiwa wirausaha. Usaha-usaha ini secara signifikan membantu terutama untuk pemasaran produk bagi masyarakat pengrajin di Desa Batankrajan karena memang dapat membuka peluang pemasaran yang lebih luas dengan jangkauan target pasar internasional. Hasil dari program yang dilakukan dinas telah mampu dipetik masyarakat pengrajin dengan meluasnya pemasaran produk usaha mereka, dari pasar lokal yang sulit dijangkau seperti NTT, NTB, Sulawesi, Papua perlahan-lahan telah berhasil dijangkau, bahkan pasar internasional juga dijelajahi.

### **c. Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap**

Dalam hal ini peran Disperindag Kabupaten Mojokerto secara aktif membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memaksimalkan bidang kerajinan perak. Hal tersebut nampak dengan adanya peran serta Disperindag Kabupaten Mojokerto sebagai fasilitator melalui TPL (Tenaga Pelatihan Lapangan) yang berkoordinasi dengan pengrajin untuk memberikan motivasi dan mendidik anak-anak muda yang belum memiliki pekerjaan agar bisa menjadi pengrajin yang inovatif dan kreatif. Dari hasil tersebut yang dilakukan pemerintah tersebut secara kongkrit telah mampu mengembangkan usaha kerajinan perak sampai menembus pasar global, hal tersebut juga berkorelasi dengan adanya penambahan penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran dapat direduksi hingga 80% yang terserap oleh usaha kerajinan perak ini.

### **3. Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan pengrajin Kerajinan Perak Agar Mampu Menjadikan Perak sebagai Produk Unggulan Daerah.**

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a. Tenaga Kerja yang Cukup Banyak**

Tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak menjadikan suatu keuntungan tersendiri bagi industri kerajinan perak selain tidak perlu susah-susah mencari tenaga kerja dari luar desa, juga akan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa Batankrajan itu sendiri.

Dalam teori tahap-tahap pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996, h.74) bahwasannya pemberdayaan itu sendiri dilakukan melalui 3 arah, salah satu pointnya adalah pemerintah bersama-sama masyarakat harus mampu Menetapkan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang

(*enabling*). Fakta mengatakan bahwa masyarakat Desa Batankrajan adalah di dominasi oleh angkatan kerja, peluang ini kemudian diserap oleh usaha kerajinan perak di Desa tersebut. Lebih dari 80% mereka yang menganggur mampu diarahkan untuk menjadi pengrajin.

##### **b. Masih Belum Banyak Pesaing Yang Memiliki Usaha Yang Sama.**

Dalam konsep tahap-tahap pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996, h.74) pada point ketiga disebutkan bahwasannya Memberdayakan itu mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah menjadi semakin lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi pihak-pihak yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemikiran kepada masyarakat yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan.

Dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto agar potensi industri kerajinan perak ini diminati dan memiliki jangkauan pasar yang luas, karena industri ini belum banyak memiliki pesaing dari wilayah lain

#### **2. Faktor Penghambat**

##### **a. Mahalnya Harga Bahan Baku**

Pada usaha kerajinan perak yang terdapat di Desa Batankrajan ini, salah satu kendala yang dihadapi adalah mahalnya harga bahan baku yaitu perak, karena fluktuasi harga juga mengikuti perkembangan atau imbas kenaikan maupun penurunan kurs dolar, tentu hal ini sangat menyulitkan bagi para masyarakat pengrajin di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg.

##### **b. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia**

Sering kali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UKM itu seperti yang diungkapkan oleh Jafar pada salah satu point pada faktor internal adalah terbatasnya kualitas sumberdaya manusia. Hal tersebut juga dialami oleh UKM kerajinan perak, dengan keterbatasan kualitas SDM nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru sehingga hal itu secara tidak langsung akan menghambat perkembangan usaha kerajinan.

##### **c. Terbatasnya Modal**

Menurut Jafar (2004, h.41), salah satu hambatan atau kendala berikutnya yang dihadapi oleh usaha kecil adalah kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan permodalan. Pada permasalahan untuk Desa Batankrajan juga demikian, kesulitan finansial yang dihadapi oleh para masyarakat pengrajin kerajinan perak kerap menjadi kendala untuk mengembangkan maupun memperluas usaha ini, walaupun memang akses-akses serta bantuan modal melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Mojokerto telah disediakan, melalui pinjaman dari Bank yang telah ditunjuk oleh Dinas.

### Kesimpulan

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah dapat diwujudkan melalui:

- a. Peningkatan Kemampuan Finansial dilakukan dengan cara memberikan bantuan lunak kepada pengrajin kerajinan perak melalui lembaga keuangan melalui Program KUR (Kredit Usaha Rakyat).
- b. Mengembangkan pemasaran dengan Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar dilakukan dengan mengikutsertakan pengrajin dalam *even-even* pameran dan memberikan pelatihan pengembangan website agar produk tersebut dikenal dengan bekerjasama dengan UPN.
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan cara mengadakan workshop dan bimbingan manajemen usaha dan pembukuan.
- d. Pemberian Pengaturan dan Pengendalian Usaha dilakukan dengan:
  1. Peningkatan Kemudahan Dalam Layanan Perijinan dengan memberikan

kemudahan dalam pengurusan ijin mendirikan usaha sampai mereka menerima surat izin dan legalisasi usaha.

2. Penguatan Kelembagaan dilakukan dengan membentuk KUB Majapahit Jewelry.

Keberdayaan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto antara lain yaitu:

- a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pengrajin
- b. Pemasaran Hasil Usaha
- c. Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap.

Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak Dalam hal ini ada dua faktor yang berperan yakni:

- a. Faktor Pendukung
  1. Tenaga Kerja Yang Cukup Banyak
  2. Masih Belum Banyak Pesaing Yang Memiliki Usaha Yang Sama
- b. Faktor Penghambat
  1. Mahalnya Harga Bahan Baku
  2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.
  3. Terbatasnya Modal

---

### Daftar Pustaka

- Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko (2002). **Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil**. Jakarta, Rineka Cipta
- Arsyad, Lincoln (1999). **Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi**. Yogyakarta, BPFE
- Eko, Dermawan (2011). Melalui: [http://kpmbwi.blogspot.com/2012/08/Akar\\_Penyebab\\_dan\\_Permasalahan.html](http://kpmbwi.blogspot.com/2012/08/Akar_Penyebab_dan_Permasalahan.html) [Diakses pada: pada hari senin 23 Desember 2013 Pukul 21.00 WIB]
- Hafsah, Mohammad Jafar (2004). **Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah Infokop No. 25 Tahun XX**
- Kartasasmita, Ginanjar (1996). **Pemberdayaan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan**. Jakarta, Cides
- Nazir, Mohamad (1998). **Metode Penelitian**. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusuma (2004). **Perencanaan Pembangunan Daerah**. Jakarta, Gramedia Pustaka Umum
- Sjaifudin, Hetifah (1995). **Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil**. Bandung, Yayasan Akatiga.
- Takdir, Muhammad (2012). **Nasionalisme dalam Bingkai Pluralitas Bangsa: Paradigma Pembangunan & Kemandirian Bangsa**. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media
- Tambunan, Tulus (2000). **Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting**. Jakarta, Salemba Empat
- Tohar, M (2002). **Membuka Usaha Kecil**. Jakarta, Kanisius